

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Wahab, Scholichin (2012), *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia),
- Azhar Akbar, Ali (2007), *Konspirasi di balik lumpur Lapindo: dari aktor hingga strategi kotor*, Yogyakarta: Galanpress.
- Darus Badzrulman, Mariam, dalam St Renny Sjahdeni dkk, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, (Departemen Kehakiman RI: Badan Pembinaan Hukum Nasional)
- Emong Sapardjaja, Komariah, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012).
- Firmansyah, Muhammad, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Hak Milik Warga Sidoarjo Oleh P.T. Lapindo Brantas*, (Universitas Indonesia, 2012)
- Fuadi, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bhakti 2002.
- Hoff, Jerry, (2000) *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, (Jakarta: P.T. Tatanusa.
- Ibrahim, Johnny (2005), *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normati”*, Malang: Bayumedia, 2005.
- Kantaatmaja, Komar, *Ganti Rugi Internasional, Pencemaran Minyak di Laut*, Bandung: Alumni, 1981.
- Kansil dan Cristine (1995), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Marzuki Mhahmud, Peter (2005), *“Penelitian Hukum”*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)

- M.A. Moegni Djojodirdjo (1982), *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002),
- N.H.T, Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Grafindo Utama, Jakarta, 2006,
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Genta Publishing, 2009).
- R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 379.
- R. Suparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 146
- R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung :Sumur1994, hlm. 13
- Rhitti, Hyronimus, *Filafat Hukum Edisi Lengkap: dari klasik sampai postmodern*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015
- Richard, Simatupang, Burton (2003), *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarwono (2011), *Hukum acara perdata (teori dan praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang, Victor dan Soekarso (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeini Remi, Sutan (2002), *Hukum Kepailitaan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soemarti Hartono, Siti (1981). *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM.
- Soekanto, Soerjono (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji (2010), “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Subhan, M.Hadi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2008)

- Suryandaru, YS (2009) *Kasus Lumpur Lapindo dalam Bingkai Media Massa*. Surabaya: LPPM Unair & TIFA Foundation
- Suharto, Edi (2008), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Social*, Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Anton (2012), *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Kencana.
- Sunggono, Bambang (2007), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafaruddin (2008), *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrul Machmud (2008), *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang di duga melakukan Medikal Malpraktek*, Cetakan kesatu, Bandung: CV. Mandar Maj.
- Usman, Rachmadi (2004) *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yani, Ahmad, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002).
- Yuhassarie, Emmy, dkk (2017) “*Pendahuluan: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*,” Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Yuhelson (2019), *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing.

## 2. Jurnal

- Ayu Azharine “Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang” Vol 7 No 2, 2016.
- Dhesta Mey Intakhiya dkk, *Strategi Dalam Penanganan Kasus Lumpur Lapindo Pada Masyarakat Terdampak Lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur*, Vol 7 No 3, 2021.
- Elmaghfira Putri Elika dkk, *Bencana Sosial Kasus Lumpur Pt. Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa Timur*, Vol 4 No 2, 2017.

### **3. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. (Lembar Negara Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara No 4443 Tahun 2004)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembar Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara Nomor 5059 Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembar Negara Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembar Negara Nomor 4725 Tahun 2007)

Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. (Lembar Negara Nomor 7 Tahun 1982, Tambahan Lembar Negara Nomor 3214 Tahun 1982)

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. (Berita Negara Nomor 40)

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723, selanjutnya disebut UU 24/2007)